AL-ILMIYA: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM
AJPI
E-ISNN: 0000-0000

Istanbul di Batavia: Diplomasi Lunak dan Jaringan Intelektual Konsulat Usmani (1882–1914)

Ari Maulana Ramadan[1], Tri Wulan Sari[2], Diah Novita Fardani[3]

[1 2] Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Correspondent Email:* arimaulana0022@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Received 01 November 2026
Revised 10 November 2026
Accepted 15 November 2026
Available online 21 November 2026

Kata Kunci:
Ottoman Empire; Batavia consulate; soft diplomacy; intellectual networks; Dutch East Indies; Hadrami

Keywords:
Daulah Usmani; Konsulat Batavia; diplomasi lunak; jaringan intelektual; Hindia Belanda; Hadrami

This is an open access article under the CC BY-SA license.

ABSTRACT

This article examines how the Ottoman consulate in Batavia, established in 1882, practised soft diplomacy and connected with intellectual networks linking the Indonesian archipelago and the Middle East. It employs qualitative library research with a historical approach, re-reading recent scholarship (2021–2026) based on Ottoman, Dutch, and Indonesian sources, supplemented by three foundational studies of the consulate. The article argues that Ottoman authority in the Dutch East Indies was symbolic, mediated, and negotiated rather than sovereign. The consulate was founded mainly to protect Ottoman subjects, Hadrami trade, and pilgrimage traffic, and it depended on Dutch recognition. Its soft diplomacy operated through consular protection, the transmission of socio-religious requests, reporting to Istanbul, and symbolic ties to the sultan-caliph, all under colonial surveillance. The consulate did not create the intellectual networks, which were centred on the Haramain and carried by Jawi scholars and Hadrami communities; it acted as a diplomatic and symbolic connector that intersected with them through shared actors, educational exchange, and Pan-Islamic sentiment. Because these networks were plural and contested, support for the Ottomans was never uniform. The outbreak of the First World War in 1914 marked a turning point rather than the end of the consulate, which operated until 1924. The article offers an integrated reading of consular diplomacy and intellectual networks in colonial Southeast Asia.

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji bagaimana Konsulat Usmani di Batavia, yang berdiri pada 1882, menjalankan diplomasi lunak dan bersinggungan dengan jaringan intelektual yang menghubungkan Nusantara dan Timur Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berjenis studi kepustakaan dengan metode sejarah, melalui pembacaan ulang literatur terbaru (2021–2026) yang berbasis sumber Usmani, Belanda, dan Indonesia, ditambah tiga kajian dasar tentang konsulat. Artikel ini berargumen bahwa otoritas Usmani di Hindia Belanda bersifat simbolik, termediasi, dan dinegosiasikan, bukan kedaulatan politik. Konsulat didirikan terutama untuk melindungi warga Usmani, perdagangan Hadrami, dan lalu lintas haji, serta bergantung pada pengakuan pemerintah kolonial. Diplomasi lunaknya bekerja melalui perlindungan konsuler, penyampaian permintaan sosial-keagamaan, pelaporan kepada Istanbul, dan ikatan simbolik dengan sultan-khalifah, semuanya di bawah pengawasan kolonial. Konsulat tidak menciptakan jaringan intelektual yang berpusat di Haramain dan dibawa oleh ulama Jawi serta komunitas Hadrami; ia berperan sebagai penghubung diplomatik dan simbolik yang bersinggungan dengan jaringan itu melalui aktor yang sama, pertukaran pendidikan, dan sentimen Pan-Islamisme. Karena jaringan tersebut majemuk dan diperebutkan, dukungan kepada Usmani tidak pernah seragam. Pecahnya Perang Dunia I pada 1914 menjadi titik balik, bukan akhir konsulat, yang tetap beroperasi hingga 1924. Artikel ini menawarkan pembacaan terpadu atas diplomasi konsuler dan jaringan intelektual di Asia Tenggara kolonial.

1. PENDAHULUAN

Hubungan antara dunia Usmani dan Asia Tenggara kerap dikisahkan dengan nada kebanggaan. Di Indonesia, narasi tentang kejayaan Usmani dalam dua dekade terakhir sering dipakai kelompok Muslim tertentu sebagai sumber legitimasi, sehingga cenderung bergerak ke arah pembentukan mitos ketimbang pengembangan pengetahuan yang bertumpu pada sumber

sejarah (Burhanudin, 2023). Peringatan ini penting karena memisahkan dua cara membaca: membayangkan Usmani sebagai kekuatan yang hadir di mana-mana, atau menelusuri lembaga konkret yang benar-benar bekerja beserta keterbatasannya. Konsulat Usmani di Batavia, yang berdiri pada 1882, adalah contoh lembaga konkret semacam itu.

Kajian dalam beberapa tahun terakhir yang memakai arsip Usmani dan dokumen Belanda menunjukkan bahwa konsulat ini merupakan ruang temu kepentingan yang tidak sederhana. Komunitas Hadrami yang merasa didiskriminasi menyampaikan keluhannya kepada konsul Usmani, dan sebagian Hadrami yang kaya mengirim anak mereka bersekolah di Istanbul (Alatas & Tekin, 2022). Status kewargaan Hadrami sebagai subjek Usmani di Singapura dan Batavia telah dikaji tersendiri (Tekin & Alatas, 2024), sedangkan laporan para konsul memperlihatkan konsulat sebagai pengamat yang menyampaikan kesan dan informasi kepada Istanbul (Akbaş, 2024). Semua itu berlangsung di bawah pemerintah kolonial yang memiliki kebijakan tersendiri terhadap Islam (Hasibuan et al., 2023).

Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut cenderung berjalan di jalurnya masing-masing. Studi diplomasi menyoroti konsul dan arsip; studi komunitas Hadrami menyoroti pendidikan dan filantropi (Alatas & Chaedar, 2022); studi jaringan ulama menyoroti Haramain, fatwa, dan kitab (Rohmana, 2023). Jarang ada pembacaan yang menanyakan bagaimana praktik diplomasi konsulat bersinggungan dengan jaringan intelektual itu, dan sejauh mana persinggungan tersebut layak disebut pengaruh. Selain itu, periodisasi yang menutup kisah konsulat pada 1914 perlu diuji, sebab konsul Usmani terakhir di Batavia, Rafet Bey, bertugas hingga 1924 (Supratman, 2017).

Artikel ini memakai dua lensa konseptual. Lensa pertama adalah diplomasi lunak (soft power), yakni gagasan Nye bahwa suatu aktor dapat membuat pihak lain menginginkan apa yang ia inginkan melalui daya tarik budaya, pendidikan, dan norma, bukan paksaan (Nye, 1990, sebagaimana dikutip dalam Ozturk, 2023). Dalam kajian kontemporer, agama diakui sebagai salah satu sumber daya lunak, tetapi dengan sifat yang ambivalen dan batas yang jelas (Ozturk, 2023). Lensa kedua adalah jaringan intelektual, yaitu jaringan guru-murid dan komunikasi keilmuan antara ulama Nusantara dan Timur Tengah yang berpusat di Mekah dan Madinah (Azra, 2004, sebagaimana dikutip dalam Rohmana, 2023). Dengan dua lensa ini, "otoritas" Usmani di Hindia Belanda dipahami sebagai otoritas simbolik yang termediasi, bukan kedaulatan politik.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini menjawab empat pertanyaan: (1) apa motif pendirian Konsulat Batavia pada 1882; (2) bagaimana strategi diplomasi lunak konsulat bekerja dalam batas-batas kolonial; (3) bagaimana konsulat bersinggungan dengan jaringan intelektual Nusantara–Timur Tengah; dan (4) bagaimana dinamika menjelang dan sesudah 1914 mengubah posisi konsulat. Argumen yang diajukan ialah bahwa konsulat bekerja melalui daya tarik pelayanan, simbol khilafah, dan informasi, bukan melalui kekuasaan teritorial, serta bersinggungan dengan jaringan intelektual sebagai penghubung, bukan sebagai pencipta. Argumen ini sekaligus mengoreksi dua kecenderungan: membesar-besarkan pengaruh Usmani, dan memandang 1914 sebagai akhir keberadaan konsulat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) dan metode sejarah. Metode sejarah dijalankan melalui empat tahap: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Objek kajian dibatasi pada Konsulat Usmani di Batavia antara 1882 dan 1914, dengan perluasan secukupnya ke periode 1914–1924 untuk menguji periodisasi tersebut.

Pada tahap heuristik, sumber utama adalah literatur ilmiah terbaru (2021–2026) yang berbasis arsip Usmani, sumber Belanda, naskah, dan surat kabar Indonesia, yang dihimpun dari jurnal dan bab buku ilmiah. Untuk fakta dasar yang belum dicakup literatur terbaru, penelitian ini memakai tiga kajian terdahulu tentang konsulat dan konsul (Çakilci et al., 2017; Supratman, 2016, 2017). Perlu ditegaskan bahwa penelitian ini tidak melakukan kerja arsip langsung; ia membaca ulang temuan-temuan berbasis arsip tersebut dan menyusunnya dalam kerangka argumentatif yang baru.

Kritik sumber dilakukan dengan menimbang jenis dan kedekatan sumber, memeriksa kesesuaian klaim dengan bukti yang dikutip penulis asalnya, serta membedakan fakta, tafsir, dan klaim yang masih memerlukan bukti. Interpretasi memakai analisis tematik terhadap empat kategori: motif pendirian, instrumen diplomasi lunak, simpul jaringan intelektual, dan kendala kolonial. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan perspektif sumber Usmani, Belanda, dan Indonesia. Historiografi disajikan secara tematik-kronologis dalam empat sub pembahasan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan disusun secara tematik-kronologis. Bagian A menjelaskan motif dan kerangka pendirian konsulat; bagian B menganalisis strategi diplomasi lunaknya; bagian C menelusuri simpul-simpul jaringan intelektual yang bersinggungan dengan konsulat; dan bagian D menguji dinamika menjelang dan sesudah 1914. Urutan ini disengaja: apa yang dapat dilakukan konsulat (B) dan dengan siapa ia terhubung (C) hanya dapat dipahami setelah alasan dan batas pendiriannya (A) jelas.

A. Motif dan Pendirian Konsulat Batavia (1882)

Hubungan Daulah Usmani dengan Asia Tenggara telah berlangsung sejak abad ke-16, salah satunya melalui hubungan diplomatik dengan Kerajaan Aceh. Hubungan tersebut mencakup bidang politik, agama, dan perdagangan. Aceh menjadi salah satu kerajaan yang aktif menjalin komunikasi dengan Usmani, terutama dalam menghadapi perkembangan politik dan ancaman kekuatan Barat. Hal ini menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara memiliki inisiatif sendiri dalam membangun hubungan dengan Usmani, bukan sekadar penerima pengaruh dari dunia Islam (Burhanudin, 2023).

Memasuki abad ke-19, hubungan Usmani dengan Asia Tenggara kembali berkembang di tengah meluasnya kolonialisme Barat. Sejumlah kerajaan di kawasan tersebut berusaha menjalin hubungan dengan Usmani untuk menghadapi tekanan kekuatan kolonial. Meskipun demikian, hubungan diplomatik itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara berada di bawah kekuasaan politik Usmani. Kajian arsip yang diulas Burhanudin (2023) memperlihatkan bahwa hubungan kedua wilayah mencakup kepentingan diplomatik, sosial-keagamaan, dan ekonomi, serta diwujudkan melalui korespondensi dan kunjungan perwakilan kerajaan-kerajaan Asia Tenggara ke Istanbul.

Salah satu perkembangan penting dalam hubungan tersebut adalah pendirian Konsulat Usmani di Batavia pada 1882. Pembukaan konsulat ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan diplomatik Usmani dengan pemerintah kolonial Belanda. Sebagai pusat pemerintahan kolonial di Hindia Belanda, Batavia memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan hubungan diplomatik tersebut. Keberadaan konsulat memungkinkan komunikasi antara pemerintah Usmani dan pemerintah kolonial dilakukan melalui jalur perwakilan resmi. Dengan demikian, pendirian konsulat tidak hanya berkaitan dengan hubungan Usmani dengan masyarakat Muslim setempat, tetapi juga dengan kepentingan diplomatiknya terhadap negara-negara Eropa yang memiliki wilayah jajahan di Asia Tenggara (Hasibuan et al., 2023).

Secara lebih khusus, salah satu motif langsung pendirian konsulat adalah perlindungan terhadap kepentingan warga Usmani yang berada di Jawa. Pemerintah Usmani

mempertimbangkan perlunya perwakilan di Batavia untuk menjaga hak warga Usmani di wilayah tersebut. Kepentingan ini berkaitan dengan keberadaan pedagang Hadrami yang memiliki hubungan dengan Usmani dan menjalankan aktivitas perdagangan antara Hindia Belanda dan Hijaz (Alatas & Tekin, 2022; Tekin & Alatas, 2024). Oleh karena itu, perlindungan warga dan kepentingan perdagangan menjadi aspek penting dalam memahami latar belakang pendirian konsulat. Dalam pembacaan artikel ini, pembedaan tersebut penting: legitimasi awal konsulat bertumpu pada kerangka hukum-diplomatik, yakni perlindungan warga, bukan pada klaim religius. Motif tersebut perlu dibedakan dari upaya memperluas pengaruh keagamaan karena keduanya tidak selalu memiliki dasar dan tujuan yang sama.

Pendirian konsulat juga menghadapi kendala administratif dan keuangan. Sayyid Aziz Efendi, seorang pedagang asal Baghdad yang menetap di Batavia, ditunjuk sebagai konsul kehormatan pada 17 Februari 1882. Penunjukan tokoh yang telah tinggal di Batavia dapat dipahami sebagai langkah praktis untuk menjalankan fungsi konsuler di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan Usmani di Istanbul. Namun, penunjukan tersebut menghadapi persoalan pengakuan dari pemerintah kolonial Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan perwakilan Usmani tidak hanya bergantung pada keputusan pemerintah di Istanbul, tetapi juga pada penerimaan pemerintah kolonial yang menguasai wilayah tempat konsulat didirikan (Çakilci et al., 2017; lihat juga Alatas, 2025).

Selain menjalankan kepentingan diplomatik dan perdagangan, konsulat berada di tengah masyarakat Batavia yang memiliki jaringan sosial, ekonomi, dan keagamaan yang beragam. Salah satunya adalah komunitas Arab, yang di bawah klasifikasi kolonial dikelompokkan sebagai "Timur Asing" dan memiliki struktur sosial internal yang berlapis (Ariyani & Roqib, 2025). Dalam administrasi kolonial, komunitas ini juga memiliki struktur kepemimpinan melalui Kapitan Arab yang berperan sebagai penghubung antara pemerintah kolonial dan komunitas Arab. Keberadaan struktur tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi sosial tempat konsulat beroperasi, meskipun hubungan langsung antara Kapitan Arab dan kebijakan Konsulat Usmani masih memerlukan bukti historis yang lebih spesifik.

Dengan demikian, pendirian konsulat bukanlah proyek politik keagamaan semata, melainkan keputusan administratif yang dikondisikan oleh tiga hal: kepentingan warga dan perdagangan, kebutuhan akan pengakuan kolonial, dan lingkungan sosial komunitas Arab yang sudah berstruktur. Ketiga kondisi ini menjadi titik tolak untuk memahami strategi diplomasi pada bagian berikut.

B. Strategi Diplomasi Lunak Konsulat Usmani

Strategi diplomasi Konsulat Usmani di Batavia dapat dipahami melalui berbagai upaya membangun hubungan dengan pemerintah kolonial Belanda dan masyarakat Muslim di Hindia Belanda. Diplomasi tersebut tidak hanya dilakukan melalui hubungan resmi antarpemerintah, tetapi juga melalui perlindungan kepentingan masyarakat, komunikasi dengan tokoh-tokoh lokal, serta hubungan sosial dan keagamaan. Dalam konteks ini, diplomasi lunak digunakan sebagai sudut pandang untuk memahami bagaimana pengaruh Usmani dijalankan tanpa harus menguasai wilayah secara langsung. Meskipun demikian, aktivitas konsulat tetap berlangsung dalam batas-batas politik kolonial yang membatasi ruang geraknya (Akbaş, 2024).

Salah satu bentuk diplomasi yang dijalankan konsulat adalah perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang memiliki hubungan dengan Usmani. Hubungan antara konsulat dan komunitas Hadrami di Hindia Belanda menjadi contoh penting dalam hal ini. Sebagian anggota komunitas tersebut menyampaikan keluhan mengenai perlakuan pemerintah kolonial kepada konsul Usmani dan berupaya memperoleh bantuan untuk memperbaiki keadaan mereka (Alatas & Tekin, 2022). Hubungan ini memperlihatkan bahwa konsulat dapat berfungsi sebagai perantara dalam menyampaikan persoalan masyarakat kepada pemerintah Usmani. Namun, perlindungan tersebut tidak berlaku secara otomatis bagi seluruh umat Islam di Hindia Belanda

karena kewenangan konsulat berkaitan dengan status dan kepentingan yang dapat diakui secara diplomatik (Tekin & Alatas, 2024).

Selain melalui perlindungan masyarakat, konsulat juga berperan dalam membangun hubungan sosial-keagamaan antara komunitas Muslim di Batavia dan pemerintah Usmani di Istanbul. Salah satu contohnya terlihat dalam komunikasi mengenai permintaan bantuan untuk perbaikan makam Sayyid Husein bin Abu Bakar al-Aydarus, masjid, dan fasilitas keagamaan, yang oleh Supratman (2016) dibaca sebagai bagian dari jaringan spiritual Usmani di Indonesia pada akhir abad ke-19. Permintaan tersebut menunjukkan bahwa hubungan dengan pemerintah Usmani tidak hanya berkaitan dengan urusan administratif dan perdagangan, tetapi juga mencakup kebutuhan sosial-keagamaan masyarakat. Dalam hal ini, konsulat menjadi penghubung yang menyampaikan aspirasi masyarakat setempat kepada pemerintah Usmani. Praktik tersebut dapat dipahami sebagai salah satu bentuk diplomasi melalui pelayanan dan hubungan sosial-keagamaan.

Strategi lainnya terlihat dalam penyampaian informasi dari Batavia kepada pemerintah Usmani di Istanbul. Konsulat tidak hanya menjalankan urusan perwakilan, tetapi juga mengirimkan laporan mengenai keadaan sosial, politik, dan keagamaan di Hindia Belanda (Akbaş, 2024). Informasi tersebut mencakup perkembangan hubungan pemerintah kolonial dengan masyarakat Muslim serta berbagai peristiwa yang dinilai penting bagi kepentingan Usmani. Laporan Ali Galib Bey, konsul jenderal Batavia yang kemudian dipindahkan ke Bombay, kepada Sultan Abdulhamid II, misalnya, menekankan pentingnya membangun hubungan antara umat Islam di kawasan itu dan khalifah (Çakilci et al., 2017). Laporan konsulat memungkinkan pemerintah di Istanbul memperoleh gambaran mengenai kondisi wilayah yang jauh dari pusat kekuasaannya. Dengan demikian, kegiatan pelaporan menjadi bagian penting dari diplomasi karena membantu pemerintah Usmani memahami situasi setempat dan menentukan langkah yang sesuai dengan kepentingannya (Burhanudin, 2023).

Kedudukan sultan Usmani sebagai khalifah juga menjadi bagian dari hubungan simbolik dengan masyarakat Muslim di luar wilayah kekuasaannya (Sakinah & Avicena, 2025). Hubungan tersebut tampak dalam praktik penghormatan terhadap sultan dan penyebutan namanya dalam kegiatan keagamaan. Berdasarkan arsip yang dibahas dalam ulasan Burhanudin (2023), konsulat Batavia pernah melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan penyebutan nama khalifah dalam salat Jumat di sejumlah masjid. Informasi semacam ini menunjukkan adanya upaya membangun kedekatan simbolik antara pemerintah Usmani dan sebagian komunitas Muslim di Hindia Belanda. Akan tetapi, praktik tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa seluruh umat Islam setempat mengakui Usmani sebagai penguasa politik mereka.

Meskipun memiliki berbagai saluran hubungan, diplomasi konsulat tetap menghadapi keterbatasan akibat pengawasan pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial mencurigai hubungan lintas wilayah yang berpotensi memperkuat solidaritas umat Islam di luar kendalinya (Hasibuan et al., 2023). Kondisi tersebut membuat konsulat perlu menjalankan aktivitasnya dengan mempertimbangkan aturan dan kepentingan pemerintah kolonial. Oleh karena itu, hubungan sosial-keagamaan, pelayanan konsuler, dan komunikasi diplomatik tidak selalu dapat berkembang secara bebas. Situasi ini memperlihatkan bahwa diplomasi Usmani di Batavia berlangsung melalui proses negosiasi yang melibatkan kepentingan pemerintah Usmani, masyarakat setempat, dan otoritas kolonial (Akbaş, 2024).

Jika keempat bentuk praktik tersebut dibaca bersama, tampak bahwa diplomasi lunak konsulat bekerja pada tiga lapis: pelayanan (perlindungan dan mediasi), simbol (kedudukan khalifah), dan informasi (laporan kepada Istanbul). Ketiganya bergantung pada sumber daya yang tidak sepenuhnya dikendalikan konsulat, yaitu izin pemerintah kolonial dan kesediaan komunitas lokal untuk berhubungan. Karena itu, daya tarik Usmani di Batavia bersifat bersyarat. Temuan ini sejalan dengan catatan Ozturk (2023) bahwa daya tarik religius adalah

sumber daya lunak yang ambivalen dan memiliki batas, dan sekaligus menjadi jembatan menuju pembahasan berikutnya: dengan siapa konsulat terhubung ketika ia tidak dapat memerintah.

C. Simpul Jaringan Intelektual Nusantara–Timur Tengah

Pertanyaan yang perlu diajukan sebelum membahas jaringan intelektual ialah apakah konsulat termasuk simpul jaringan keilmuan. Jawaban artikel ini bersyarat. Jaringan keilmuan Nusantara–Timur Tengah jauh lebih tua daripada konsulat, dan pusatnya bukan Batavia ataupun Istanbul, melainkan Haramain. Tanah Suci tidak hanya menjadi tujuan ibadah haji dan sumber ilmu, tetapi juga rujukan legitimasi politik dan fatwa; para mufti Mekah dan Madinah dipandang memiliki otoritas besar dalam menjawab persoalan keagamaan umat, termasuk umat di Nusantara (Rohmana, 2023). Karena itu, konsulat lebih tepat dibaca sebagai simpul penghubung yang bersinggungan dengan jaringan tersebut daripada sebagai pusatnya.

Rohmana (2023) menunjukkan pola yang berlangsung lama. Pada abad ke-17, ulama Nusantara seperti ʿAbd al-Raʾūf al-Sinkīlī meminta fatwa kepada ulama Madinah seperti Ibrāhīm al-Kūrānī. Pada abad ke-19, Sayyid Aḥmad Zaynī Daḥlān, mufti Syafi'i di Mekah, menerima banyak pertanyaan dari Nusantara, termasuk tentang sikap terhadap pemerintah kolonial yang non-Muslim. Menjelang akhir abad ke-19, posisi ini bergeser: ulama Jawi seperti Ahmad Khatib al-Minangkabawi dan Mukhtar ʿAṭārid dari Bogor menjadi pengajar di Masjidil Haram dan dimintai fatwa, bahkan Ahmad Khatib terlibat polemik dengan mufti Batavia, Sayyid ʿUthmān, pada 1890. Pergeseran dari peminta menjadi pemberi fatwa ini penting bagi argumen artikel ini, sebab menunjukkan bahwa jaringan tersebut memiliki otonomi intelektual: ulama Nusantara bukan sekadar penerima arahan dari Timur Tengah, apalagi dari Istanbul.

Pada saat yang sama, jaringan Haramain tidak homogen. Naskah bantahan K.H. Raden Asnawi Kudus, yang bermukim di Mekah pada 1894–1916, terhadap fatwa mufti Mekah ʿAbdullāh al-Zawāwī memperlihatkan benturan awal antara ulama tradisionalis Jawi dan arus modernis yang dipengaruhi gagasan Muhammad ʿAbduh dan Rasyid Ridha. Al-Zawāwī sendiri dilaporkan dekat dengan majalah al-Imam di Singapura yang terpengaruh al-Manar, dan pernah mengunjungi Singapura, Batavia, serta Pontianak dalam rentang 1893–1908 (Rohmana, 2023). Gambaran ini memperlihatkan lalu lintas dua arah: ulama dan gagasan bergerak dari Mekah ke kota-kota pelabuhan Nusantara, sementara pertanyaan dan teks bergerak sebaliknya. Konsekuensinya bagi tema artikel ini jelas: simpati terhadap Usmani sebagai khalifah tidak dapat dibaca otomatis sebagai kesatuan sikap intelektual, karena ulama yang sama-sama bersentuhan dengan Haramain dapat berseberangan secara tajam.

Simpul kedua, dan yang paling langsung bersinggungan dengan konsulat, adalah komunitas Hadrami di kota-kota pelabuhan. Kerja sama Hadrami dan Usmani pada 1880-an hingga 1910-an didorong oleh pedagang Hadrami yang kaya dan para konsul Usmani di Batavia; sebagian dari mereka mengirim anak-anaknya belajar ke Istanbul (Alatas & Tekin, 2022). Di Batavia, ʿAbd Allāh bin ʿAlwī al-ʿAṭṭās (w. 1929), pemilik properti Hadrami, menjadi pendukung reformisme Islam dan penyokong gerakan kebangkitan Hadrami, terutama di bidang pendidikan (Alatas & Chaedar, 2022). Pada fase yang sama, Jamiat Kheir didirikan oleh komunitas Hadrami di Batavia pada awal abad ke-20 dan dikenal sebagai pelopor pendidikan Islam modern yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum (Ariyani & Roqib, 2025; Zein, 2025). Dari sini dapat dibaca suatu pembagian kerja: konsulat menyediakan saluran hukum-diplomatik dan simbolik, sedangkan jaringan Hadrami menyediakan modal, lembaga, dan murid. Hubungan itu saling membutuhkan, bukan hierarkis.

Namun komunitas ini sendiri terbelah. Struktur sosial Hadrami terbagi atas Sayyid, Syekh, dan Qabili, dan di bawah klasifikasi kolonial "Timur Asing", nasab menjadi modal simbolik yang dipertahankan kelompok Sayyid (Ariyani & Roqib, 2025). Ketika Ahmad Surkati, guru yang diundang untuk Jamiat Kheir, menolak elitisme nasab, ia mengundurkan diri

dan kemudian mendirikan Al-Irsyad pada 6 September 1914 (Ariyani & Roqib, 2025). Perpecahan ini menunjukkan bahwa konsul yang berhubungan dengan "komunitas Hadrami" sesungguhnya berhadapan dengan kelompok yang berlapis dan bersaing. Ia juga menandai 1914 sebagai titik balik dalam jaringan intelektual, bertepatan dengan titik balik politik yang dibahas pada bagian D.

Simpul ketiga adalah konsul itu sendiri dan jaringan simbol religius yang ia layani. Supratman (2017) membaca Rafet Bey melalui pendekatan sejarah intelektual dan sejarah global, sehingga konsul tampil sebagai aktor yang berpikir dan menulis, bukan sekadar pejabat administratif. Laporan para konsul tentang masyarakat Indonesia (Akbaş, 2024) dan laporan Ali Galib Bey kepada Sultan (Çakilci et al., 2017) adalah teks yang menghubungkan pengetahuan lapangan dengan Istanbul. Sementara itu, perhatian Istanbul terhadap makam dan masjid Sayyid Husein al-Aydarus di Batavia menunjukkan jaringan spiritual yang bergerak ke arah sebaliknya (Supratman, 2016). Pada kedua kasus ini, aliran pengetahuan bersifat dua arah: informasi mengalir ke Istanbul, dan perhatian simbolik mengalir ke komunitas lokal.

Pihak kolonial pun merupakan simpul dalam jaringan ini. Snouck Hurgronje, yang tiba di Mekah pada 1885, mengikuti halaqah al-Zawāwī dan mengamati metode pengajaran di Masjidil Haram, dan surat-surat al-Zawāwī kepadanya tersimpan di Leiden (Rohmana, 2023). Artinya, pengetahuan tentang jaringan ini juga dikumpulkan oleh pemerintah kolonial, yang membantu menjelaskan kecurigaan terhadap hubungan lintas wilayah sebagaimana dibahas pada bagian B.

Tabel 1. Simpul jaringan intelektual dan titik temunya dengan Konsulat Usmani

Simpul	Aktor dan lembaga	Fungsi dalam jaringan	Titik temu dengan konsulat	Sumber
Haramain (Mekah–Madinah)	Ulama Jawi (Ahmad Khatib al-Minangkabawi, Mukhtar ʿAṭārid, Asnawi Kudus); mufti Mekah	Pusat belajar, fatwa, dan produksi kitab	Tidak langsung: simbol khalifah, lalu lintas haji, dan pertukaran gagasan	Rohmana (2023)
Komunitas Hadrami Batavia	Pedagang kaya, ʿAbd Allāh al-ʿAṭṭās, Jamiat Kheir	Modal, sekolah modern, pengiriman pelajar	Langsung: pengaduan kepada konsul dan pengiriman pelajar ke Istanbul	Alatas & Tekin (2022); Alatas & Chaedar (2022); Ariyani & Roqib (2025)
Konsulat dan konsul	Konsul jenderal (misalnya Ali Galib Bey dan Rafet Bey)	Laporan, mediasi, penghubung ke Istanbul	Inti jaringan diplomatik	Akbaş (2024); Çakilci et al. (2017); Supratman (2017)
Jaringan spiritual-simbolik	Makam dan masjid Sayyid Husein al-Aydarus; penyebutan khalifah dalam khutbah	Legitimasi simbolik dan kedekatan emosional	Konsul menyampaikan permintaan bantuan dan melaporkan praktik keagamaan	Supratman (2016); Burhanudin (2023)
Pengawasan kolonial	Pemerintah Hindia Belanda; Snouck Hurgronje	Pengumpul pengetahuan sekaligus pengendali	Membatasi ruang gerak konsulat	Rohmana (2023); Hasibuan et al. (2023)

Sumber: sintesis penulis dari literatur yang dikutip.

Tabel 1 merangkum bahwa konsulat tersambung dengan jaringan intelektual melalui tiga jalur: aktor yang sama (Hadrami, jamaah haji, dan konsul), lembaga yang sama (sekolah dan

perkumpulan Hadrami), serta simbol yang sama (khalifah). Tidak satu pun jalur itu menempatkan konsulat sebagai pencipta jaringan. Dalam bahasa konseptual, konsulat berfungsi sebagai simpul penghubung (bridging node): ia mempertemukan jaringan keilmuan yang berpusat di Haramain dengan jaringan diplomatik yang berpusat di Istanbul, tanpa menggantikan salah satunya. Pembacaan ini perlu disertai satu catatan kehati-hatian. Sumber-sumber yang ditelaah dalam artikel ini belum cukup untuk menunjukkan bahwa konsulat mendanai atau mengarahkan lembaga keilmuan tertentu; yang terdokumentasi lebih jelas adalah kerja sama dengan pedagang Hadrami dan pengiriman pelajar ke Istanbul (Alatas & Tekin, 2022). Pengaruh intelektual konsulat karena itu paling tepat disebut fasilitatif dan simbolik.

D. Dinamika dan Berakhirnya Era Konsulat (Menuju 1914)

Menjelang awal abad ke-20, aktivitas Konsulat Usmani di Batavia berlangsung dalam situasi politik yang semakin kompleks. Konsulat tidak hanya berhadapan dengan kepentingan pemerintah kolonial Belanda, tetapi juga harus mengikuti perkembangan politik internasional yang memengaruhi kedudukan Kesultanan Usmani. Salah satu tokoh yang berperan dalam periode tersebut adalah Rafet Bey, yang bertugas sebagai konsul Usmani di Batavia pada rentang 1911–1924. Keberadaannya memperlihatkan bahwa hubungan diplomatik Usmani dengan Hindia Belanda masih berlangsung hingga memasuki masa Perang Dunia I. Oleh karena itu, tahun 1914 lebih tepat dipahami sebagai titik perubahan dalam dinamika konsulat, bukan sebagai tahun berakhirnya keberadaan konsulat itu sendiri (Supratman, 2017).

Perubahan situasi semakin terasa ketika Perang Dunia I pecah pada 1914 dan Kesultanan Usmani terlibat dalam konflik tersebut. Perang ini memengaruhi hubungan Usmani dengan berbagai wilayah Muslim di luar kekuasaannya, termasuk Hindia Belanda yang berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Dalam kondisi tersebut, hubungan antara masyarakat Muslim setempat dan pemerintah Usmani menjadi persoalan yang sensitif karena dapat berkaitan dengan solidaritas keagamaan dan perkembangan politik internasional. Pemerintah kolonial memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas kekuasaannya sehingga hubungan lintas wilayah yang melibatkan Kesultanan Usmani berpotensi menimbulkan kecurigaan. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa aktivitas konsulat tidak dapat dilepaskan dari perubahan hubungan internasional dan kebijakan kolonial pada masa perang (Supratman, 2022).

Perkembangan lain terlihat setelah Kesultanan Usmani mengumumkan seruan jihad pada November 1914. Peristiwa tersebut memperoleh perhatian di kalangan masyarakat Muslim di Hindia Belanda dan berkaitan dengan munculnya kegiatan solidaritas terhadap masyarakat Usmani. Salah satu bentuknya adalah pembentukan komite Hilal Ahmer Cemiyeti di Indonesia yang menghimpun sumbangan untuk membantu masyarakat Usmani selama perang. Menurut Supratman (2022), kegiatan tersebut terutama melibatkan kalangan Muslim keturunan Hadrami, dan seruan jihad itu sendiri disebarkan melalui surat kabar lokal. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa hubungan antara Usmani dan masyarakat Muslim di Hindia Belanda tidak hanya berlangsung melalui saluran diplomatik resmi, tetapi juga melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan. Meskipun demikian, aktivitas solidaritas tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh umat Islam di Hindia Belanda mendukung kebijakan politik Usmani.

Perubahan hubungan antara Kesultanan Usmani dan masyarakat Muslim di Hindia Belanda terus berlanjut setelah Perang Dunia I. Pembubaran Kesultanan Usmani pada 1922 dan penghapusan kekhalifahan pada 1924 memunculkan respons di berbagai kalangan Muslim, termasuk melalui pemberitaan dan kegiatan yang berkaitan dengan gagasan Pan-Islamisme. Prayogi (2023) menjelaskan bahwa perkembangan tersebut menjadi bagian dari respons umat Islam di Hindia Belanda terhadap runtuhnya kekuasaan Usmani. Konteks ini penting untuk

memahami perubahan hubungan simbolik dan politik yang sebelumnya terjalin dengan kesultanan. Namun, peristiwa setelah 1914 sebaiknya diposisikan sebagai perkembangan lanjutan, bukan sebagai bukti bahwa konsulat di Batavia langsung berakhir ketika Perang Dunia I dimulai.

Jika dibaca bersama bagian C, 1914 tampak sebagai titik balik ganda. Secara eksternal, pecahnya perang mengubah konsulat dari penyedia layanan dan simbol menjadi pusat gravitasi solidaritas masa perang, dengan kegiatan Hilal Ahmer Cemiyeti sebagai bentuk barunya. Secara internal, perpecahan Jamiat Kheir dan lahirnya Al-Irsyad pada tahun yang sama menunjukkan bahwa komunitas yang menjadi mitra utama konsulat sedang menata ulang dirinya (Ariyani & Roqib, 2025). Dua perubahan ini berjalan bersamaan tetapi tidak dapat disatukan menjadi satu sebab. Yang dapat dikatakan adalah bahwa lingkungan tempat konsulat bekerja berubah lebih cepat daripada kapasitasnya untuk menyesuaikan diri. Akhir era konsulat yang sesungguhnya tidak ditentukan oleh 1914, tetapi oleh hilangnya sumber legitimasi yang ia wakili, yakni kesultanan dan khilafah pada 1922–1924.

4. KESIMPULAN

Artikel ini menunjukkan bahwa otoritas Daulah Usmani di Hindia Belanda melalui Konsulat Batavia lebih tepat dipahami sebagai otoritas simbolik yang termediasi dan dinegosiasikan daripada kedaulatan politik. Pertama, motif pendirian konsulat pada 1882 terutama bersifat hukum-diplomatik dan ekonomi, yakni perlindungan warga Usmani dan kepentingan perdagangan Hadrami, dan keberlangsungannya bergantung pada pengakuan pemerintah kolonial. Kedua, strategi diplomasi lunaknya bekerja melalui tiga lapis, yaitu pelayanan, simbol khilafah, dan informasi, yang seluruhnya dibatasi pengawasan kolonial sehingga daya tariknya bersyarat.

Ketiga, dalam hubungannya dengan jaringan intelektual, konsulat berfungsi sebagai simpul penghubung, bukan pusat. Jaringan keilmuan Nusantara–Timur Tengah berpusat di Haramain, memiliki otonomi intelektual, dan sangat majemuk, sehingga kedekatan simbolik dengan Usmani tidak identik dengan keseragaman sikap. Pengaruh intelektual konsulat bersifat fasilitatif, terutama melalui kerja sama dengan komunitas Hadrami dan pengiriman pelajar ke Istanbul. Keempat, 1914 merupakan titik balik, baik karena pecahnya Perang Dunia I maupun karena perubahan di dalam komunitas Hadrami, tetapi bukan akhir konsulat, yang bertahan hingga 1924 di bawah Rafet Bey.

Temuan ini memiliki dua implikasi. Secara historiografis, pembacaan terpadu atas diplomasi konsuler dan jaringan intelektual membantu menghindari kecenderungan mengisahkan Usmani secara mitologis, sejalan dengan peringatan Burhanudin (2023). Secara pedagogis, kasus ini layak dimanfaatkan dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk melatih peserta didik membedakan simpati simbolik, hubungan diplomatik, dan kekuasaan politik. Keterbatasan artikel ini ialah ketiadaan kerja arsip langsung dan terbatasnya bukti tentang peran Kapitan Arab serta aliran dana konsulat ke lembaga keilmuan. Penelitian lanjutan perlu menelusuri arsip Usmani, sumber Belanda, dan surat kabar sezaman untuk menguji dan memperkaya argumen ini.

5. DAFTAR PUSTAKA

Akbaş, L. (2024). Osmanlı Devleti'nin Batavya (Cakarta) şehbenderlerinin Endonezya izlenimleri. Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences, 26(3), 1351–1366. https://doi.org/10.32709/AKUSOSBIL.1196233

Alatas, A. (2025). Fostering hope: The presence of the Ottoman Consulate in Batavia, 1882–1924 [Makalah]. The Ottomans and the Malay World: Contemporary Reflections on History, Culture, and Economy, ISTAC-IIUM, 14–15 Oktober 2023. http://irep.iium.edu.my/id/eprint/123658

Alatas, A., & Chaedar, M. (2022). Investing in the ummatic cause: The philanthropic activities of ʿAbd Allāh ibn ʿAlawī al-ʿAṭṭās (d. 1929). Qudus International Journal of Islamic Studies, 10(1), 1–36.

Alatas, A., & Tekin, A. (2022). The Indonesian-Hadramis' cooperation with the Ottoman and the sending of Indonesian students to Istanbul, 1880s–1910s. Tarih İncelemeleri Dergisi, 37(1), 27–52. https://doi.org/10.18513/egetid.1148561

Ariyani, D., & Roqib, M. (2025). Stratifikasi pendidikan Islam: Implikasi kafa'ah dalam pendidikan pada Jamiat Kheir dan Al-Irsyad. Jurnal Kependidikan, 13(2), 267–286. https://doi.org/10.24090/jk.v13i2.14667

Burhanudin, J. (2023). Hubungan Asia Tenggara–Usmani dalam arsip Turki [Ulasan buku]. Studia Islamika, 30(2), 383–400. https://doi.org/10.36712/sdi.v30i2.36296

Çakilci, D., dkk. (2017). Batavya'da Osmanlı başşehbenderliği: Kuruluşu, başşehbender Ali Galib Bey ve layihası [Ottoman consulate general in Batavia: Establishment, Consul General Ali Galib Bey and his report]. International Journal of Eurasia Social Sciences, 8(28), DCCXXVI–DCCXLIX. https://rrpubs.com/index.php/ijoess/article/view/925

Hasibuan, S. B., Hidayat, A. A., & Supendi, U. (2023). The realization of Islamic politics of the Dutch East Indies government and its effect on Islam (XIX–XX century). HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah, 11(2), 393–408. https://doi.org/10.24127/hj.v11i2.8437

Ozturk, A. E. (2023). Religious soft power: Definition(s), limits and usage. Religions, 14(2), 135. https://doi.org/10.3390/rel14020135

Prayogi, A. (2023). Pan-Islamism and response to the collapse of Ottoman Turks in the Dutch East Indies. Paramita: Historical Studies Journal, 33(1), 76–85. https://doi.org/10.15294/paramita.v33i1.36343

Rohmana, J. A. (2023). Risālat al-Sheikh Asnawī al-Quds al-Jāwī: Rebuttal of Jawi ulama against fatwa of the Meccan ulama. Studia Islamika, 30(3), 469–494. https://doi.org/10.36712/sdi.v30i3.25055

Sakinah, S. Q., & Avicena, M. Z. (2025). Turki Utsmani 1299–1924: Sistem politik, pemerintahan, bentuk negara, perkembangan intelektual, ilmu, agama dan budaya. Tarikh: Journal of Islamic History and Civilization, 1(2), 224–242. https://doi.org/10.61630/TJIHC.V1I2.16

Supratman, F. R. (2016). Makam Sayyid Husein bin Abu Bakar al-Aydarus: Jaringan spiritual Usmani di Indonesia akhir abad ke-19. Afkaruna, 12(2), 169–186.

Supratman, F. R. (2017). Rafet Bey: The last Ottoman consul in Batavia during the First World War 1911–1924. Studia Islamika, 24(1), 33–67. https://doi.org/10.15408/sdi.v24i1.3684

Supratman, F. R. (2022). Negara Usmani dan Hilal Ahmer Cemiyeti di Indonesia selama Perang Dunia I (1914–1918). Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam, 19(2), 212. https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v19i2.19586

Tekin, A., & Alatas, A. (2024). Hadramis as Ottoman subjects in Singapore and Batavia. Dalam İ. H. Göksoy & İ. H. Kadı (Ed.), Studies on the relations between the Ottoman Empire and Southeast Asia (hlm. 173–208). YTB Publications.

Zein, D. (2025). Jamiat Kheir: A catalyst for Islamic intellectual renewal and educational transformation in early 20th century Java. Journal of Islamic History, 5(1), 49–62.